I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang menjalankan tugas kepolisian sebagai profesi, maka membawa konsekuensi adanya kode etik profesi maupun peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi maupun Peraturan Disiplin Kepolisian bagi anggota Polri merupakan suatu hal yang tak terelakkan, mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian akan selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung. Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin kepolisian, maka anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Sidang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan yang mengatur perilaku anggota Polri yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi Polri maupun peraturan disiplin merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, ada juga anggota Polri yang berperilaku menyimpang

sehingga melanggar kode etik Polri, peraturan disiplin, bahkan melanggar ketentuan hukum pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Polri akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan di pengadilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan pengadilan umum".

Berkaitan dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana, hal ini dapat diketahui dari berita yang disiarkan oleh media massa mengenai oknum polisi yang melakukan perzinahan, penggunaan dan penyalahgunaan narkoba atau psikotropika sampai penadahan barang hasil kejahatan yang jelas-jelas merugikan nama baik institusi atau lembaga Kepolisian tempat ia bertugas.

Contoh adanya oknum polisi yang melakukan tindak pidana dapat diketahui dari berita media cetak yang menulis tentang Briptu Yudi Aryo Gunawan dilaporkan isterinya ke Propam Polres Lampung Utara, karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Kini isterinya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Ryacudu Kotabumi.¹

¹ Radar Lampung, 1 September 2012.

Selanjutnya kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Satnarkoba Polres Lampung Selatan (Aipda Sg). Berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya tersebut, Kapolres Lampung Selatan AKBP Tatar Nugroho telah memerintahkan bagian Propam untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan yang dilakukan terhadap Andrie Saputra.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana diberitakan di atas, membawa konsekuensi yang cukup berat, yaitu dapat diproses berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa pelanggaran disiplin, kode etik maupun ketentuan hukum pidana.

Berkaitan dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana (kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan) merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana, sehingga harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan oleh anggota polisi tersebut.

Masyarakat sipil maupun anggota polisi yang melakukan tindak pidana dan melanggar hukum harus di proses dan diperlakukan sama di depan hukum agar tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana, disebutkan dalam Pasal 28 huruf d butir (1) ; "bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan hak dan martabat, serta perlakuan yang sama di muka hukum". Asas isi biasa disebut dengan "*equality before the law*",

² Radar Lampung, 5 Oktober 2012.

yaitu asas persamaan di muka hukum. Ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang Tentara Nasional Indonesia) berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa konsekuensi apabila anggota polisi melakukan tindak pidana maka diadili oleh peradilan umum dan disidik oleh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan lagi oleh polisi militer.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penyidikan terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kajian bidang ilmu dan bidang substansi. Ruang lingkup penelitian dalam bidang ilmu adalah kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Kajian bidang substansi meliputi pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana dan lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penulisan ini adalah untuk mengungkap secara objektif berdasarkan kemampuan daya nalar dan acuan melalui langkah-langkah atau metode ilmiah tentang cara yang dilakukan penyidik dalam memeriksa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh sesama anggota Kepolisian.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis sendiri, dan juga merupakan masukan bagi penyidik bilamana dalam melakukan penyidikan dan tersangka yang melakukan tindak pidana adalah sesama anggota Kepolisian.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka Teoretis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran, atau merupakan kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.

Pelaksanaan tugas penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing selaku penyidik. Pejabat Penyidik dalam hal ini pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

³ SoerjonoSoekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hal. 124.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP sebagai berikut:

- a. Menerima Laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak-pidana
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka
- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan perundang-undangan serta bertanggung jawab.

Berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan PAF. Lamintang⁴ mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Seorang penyidik harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikan setelah ia menggunakan wewenang penyidikannya seperti yang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, atau perbuatan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana dan tersangka ternyata bukan pelaku tindak pidana”. Artinya, bahwa suatu peristiwa yang semula diduga merupakan tindak pidana adalah benar-benar

⁴ P.A.F. Lamintang. (dalam Harun. M. Husein). 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hal. 87.

merupakan tindak pidana, dan terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni :

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah- rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara.
- c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah – rendahnya Bintara
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah - rendah nya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara

pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana, yang merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, menurut Soerjono Soekanto⁵ tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum).

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

2. Faktor penegak hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi huktim pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik wisata.

⁵ Soerjono Soekanto. 1991. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. hal. 45.

3. Faktor Prasana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

4. Faktor kesadaran hukum

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus berupa kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan maupun yang akan diteliti.⁶

a. Tindak Pidana

Perbuatan yang dengan diancam pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷

⁶ Soerjono Soekanto. 1984. *opcit.* hal. 132.

⁷ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Bina Aksara. Jakarta. hal. 54.

b. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁸

c. Anggota Kepolisian

Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 butir (2))⁹

d. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melakukan Penyidikan.¹⁰

e. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹

⁸ Pasal 1 butir 14 KUHAP.

⁹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Pasal 1 butir 2 KUHAP.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini memuat tentang uraian keseluruhan yang akan disajikan guna memudahkan dalam memaharni tentang skripsi ini yang disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menerangkan tentang latar belakang penulisan skripsi dalam bentuk uraian yang kemudian merumuskan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual yang digunakan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tentang pengertian pengertian tindak pidana, penyidikan dan pelaksanaan tugas penyidikan, tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta tugas dan wewenang Polri.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yang menunjukkan langkah-langkah yang di pakai dalam penelitian berupa pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dari permasalahan dan juga hasil dari penelitian, yaitu tentang karakteristik responden, pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana, dan faktor penghambat penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana.

V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran yang diajukan sebagai masukan bagi instansi terkait.